

Jurnal Sosiologika. Vol. 1(1), 2018: 11 – 20

© Program Studi Sosiologi FISIP UNAS

Perempuan Pedagang Papua Di Wilayah Perbatasan

Erna Chotim

Universitas Nasional

Abstract

Tulisan ini menguraikan peran dan kedudukan Perempuan Papua dan kedudukan Orang Asli Papua di dalam gerak kemajuan perdagangan yang terjadi di wilayah perbatasan. Titik tolak persoalannya berangkat dari serangkaian pertanyaan tentang kendala-kendala yang dihadapi kelompok penduduk asli Papua dan terutama kaum perempuannya dalam proses gerak dan pertumbuhan perdagangan dan ekonomi wilayah. Rangkaian pertanyaan ini menjadi bagian penting yang menjadi acuan deskripsi, analisis dan rekomendasi dalam dokumen ini.

Keywords: Perempuan, Perdagangan Perbatasan, Papua

Pengantar

Kegiatan perdagangan skala kecil di perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, distrik Muara Tami, Kotamadya Jayapura, memiliki peran penting terhadap perkembangan sosial-ekonomi di distrik itu khususnya dan kota Jayapura pada umumnya. Kegiatan perdagangan perbatasan itu juga menjadi gambaran menarik tentang perdagangan perbatasan dengan surplus yang diterima pihak Indonesia.

Sejak dibukanya wilayah perbatasan itu pada 1999 dan digulirkannya inisiatif membangun pasar percontohan Skouw-Wutung di perbatasan RI-PNG oleh Departemen Perdagangan RI, Departemen Perdagangan mencatat besaran omset dari kegiatan ekonomi di pasar itu yang mencapai sekitar Rp. 64.678.410.000 dan mengalami peningkatan signifikan pada 2015 yang menjadi sekitar Rp. 96.000.000.000. Angka ini bahkan jauh melampaui catatan resmi perdagangan ekspor dari wilayah Jayapura ke PNG yang mencapai sekitar US \$ 27,762.87 pada 2013 (Jayapura Dalam Angka, 2014).

Angka-angka tersebut menjadi gambaran menarik keuntungan ekonomi yang didapat dari perdagangan perbatasan yang sampai sekarang belum tercatat (*unrecorded trade*) di dalam transaksi perdagangan formal pemerintah Indonesia. Barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, makanan kemasan, alat rumah tangga, dan perangkat elektronik mengalir dari wilayah Indonesia menuju PNG dalam cara tradisional mengikuti kebiasaan penduduk di dua negara itu untuk saling berkunjung melintasi perbatasan.

Penulisan ini adalah ringkasan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan pada akhir tahun 2015 di wilayah perbatasan Kotamadya Jayapura, khususnya di distrik Muara Tami yang menjadi distrik yang berbatasan langsung dengan wilayah PNG. Dalam penelitian itu, tim peneliti mencoba membuat kombinasi metode, kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei dikombinasikan dengan pengamatan, wawancara mendalam dengan pelaku-pelaku ekonomi perbatasan untuk mengetahui dinamika, relasi, interrelasi dan intervensi pemerintah yang pernah dan sedang berlangsung khususnya terkait dengan kementerian perdagangan dalam upaya untuk percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.

Dengan berpijak pada hasil penelitian tersebut, tulisan ini mencoba memfokuskan perhatian pada persoalan terkait dengan upaya pemberdayaan Orang Asli Papua, khususnya kaum perempuannya, terkait dengan kemajuan ekonomi melalui kegiatan perdagangan di distrik Muara Tami. Pertanyaannya pentingnya adalah seberapa besar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lokal dan perbatasan memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua (OAP) sebagai 'tuan rumah? Apakah semua komponen masyarakat Papua khususnya perempuan dapat menjadi bagian dan penerima manfaat dari proses pembangunan dan hasil pertumbuhan ekonomi lokal dan perbatasan?

Konteks Historis dan Perkembangan Distrik Muara Tami Sebagai Kawasan Perbatasan Negara

Sebelum masuk pada pembahasan tentang dinamika ekonomi perdagangan wilayah perbatasan dan peran perempuan, kertas posisi ini ingin mengawali dengan gambaran umum tentang kondisi wilayah distrik Muara Tami sebagai distrik yang berbatasan langsung dengan wilayah PNG. Gambaran umum ini memuat informasi tentang aktivitas perdagangan wilayah perbatasan dengan seluruh dinamika pentingnya

termasuk tentang “ketimpangan” yang terjadi antara kelompok pendatang dari etnis

Jawa, Bugis, dan Makassar yang datang ke wilayah itu melalui program transmigrasi pemerintah pada pertengahan dekade 1980an, dengan penduduk OAP yang telah lama bermukim di wilayah itu.

Perkembangan distrik Muara Tami sebagai kawasan pemukiman berbatasan langsung dengan negeri tetangga. Hal ini sudah berlangsung sangat lama. Pada 1970an, wilayah itu sebagian besar masih berupa hutan dan semak-belukar. Hanya dalam waktu satu dekade kemudian, Muara Tami berkembang menjadi wilayah pemukiman baru di kota Jayapura melalui intervensi pemerintah Orde Baru yaitu program transmigrasi pada pertengahan 1980an. Seiring dengan kedatangan para pemukim transmigran di wilayah tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan dana sebesar US \$ 66 juta untuk pengembangan wilayah tersebut melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pembentukan pusat-pusat perdagangan, kesehatan, pendidikan dan termasuk keamanan melalui pembangunan pos-pos keamanan menuju wilayah perbatasan.¹

Secara geografis, distrik Muara Tami juga merupakan distrik paling luas di kota Jayapura (626.7 Km²) dan sekaligus memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling rendah (19 jiwa per kilometer) di kota tersebut. Jumlah total penduduknya mencapai sekitar 11.869 jiwa atau sekitar 4,35 % dari total penduduk kota Jayapura (Tabel 1).

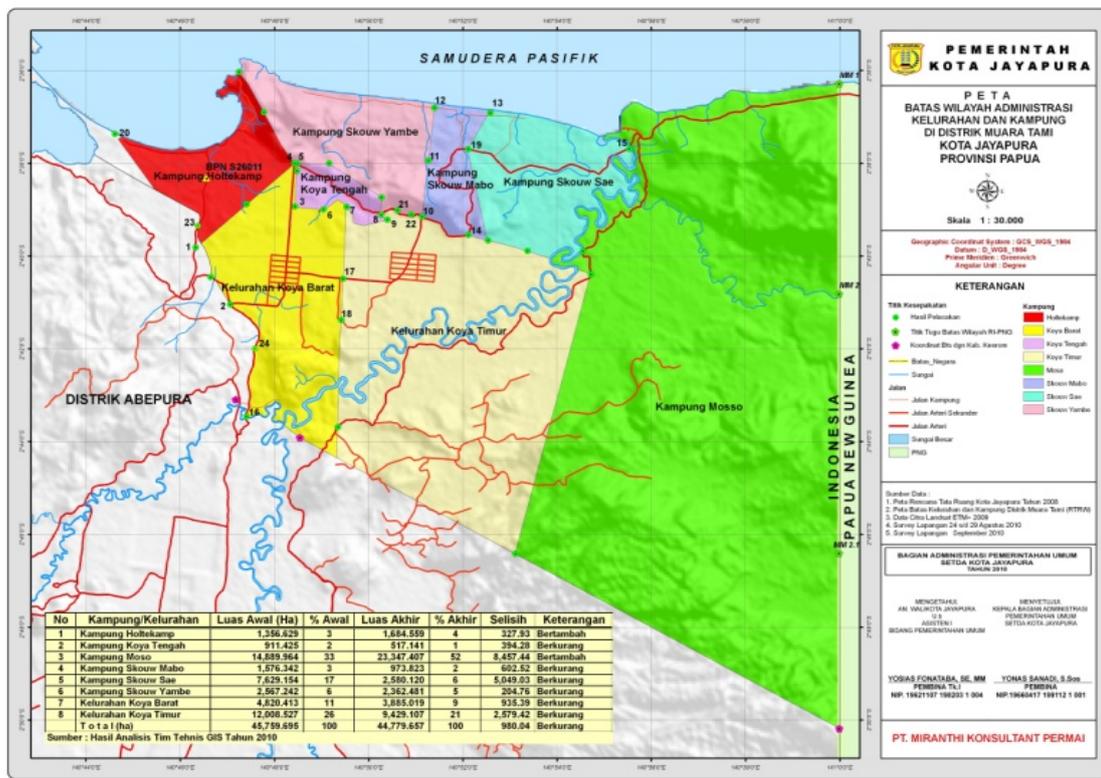
Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kotamadya Jayapura, 2013

Wilayah	Luas Wilayah	%	Jumlah Penduduk	%	Kepadatan Penduduk
Muara Tami	626.7	67	11.869	4,35	19
Jayapura Selatan	43.4	4,62	71.178	26,12	1.640
Jayapura Utara	51.0	5,43	69.099	25,35	1.355
Abepura	155.7	16,56	77.750	28,46	498
Heram	63.2	6,72	42.828	15,71	678

Sumber: *Data diolah dari Kota Jayapura Dalam Angka 2014* . Badan Pusat Statistik Kota Jayapura 2014.

Dalam peta administrasi pemerintah kotamadya Jayapura, Distrik Muara Tami adalah distrik paling timur yang berbatasan langsung dengan wilayah Papua Niuew Guinea di bagian timur. Sedangkan di bagian utara ia berbatasan dengan Samudera Pasifik dan sebelah selatan dengan kabupaten tetangga Kerom. Sementara di bagian barat distrik tersebut berbatasan langsung dengan Distrik Abepura yang menjadi salah satu pusat perdagangan yang ramai di kota Jayapura. Di distrik Muara Tami pula terletak pos perbatasan Skouw-Wutung yang sejak 2010 diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan gerai perbatasan sebagai gerbang penghubung ekspor barang-barang Indonesia melalui jalur darat menuju wilayah PNG.

¹ Agenda pemerintah Indonesia untuk mengembangkan wilayah ini juga berkait dengan dengan persoalan keamanan dengan adanya aktivitas Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menjadikan wilayah distrik Muara Tami sebagai salah satu basis perlawanannya. Agenda lainnya adalah ‘bujukan’ kepada orang-orang Papua yang telah ‘menyeberang’ wilayah perbatasan untuk kembali bermukim di Indonesia (May, 2001: 297).



Gambar 1. Peta Distrik Muara Tami, Kotamadya Jayapura

Sekarang ini, penduduk di distrik Muara Tami tersebar di delapan wilayah setingkat kelurahan dan kampung. Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 2, konsentrasi terbesar penduduk terdapat di wilayah Koya Barat dan Koya Timur. Terkait dengan perkembangan penduduk dan infrastruktur wilayah, baik Koya Barat dan Koya Timur secara administratif melalui Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 13/2002 menjadi wilayah setingkat kelurahan. Sementara wilayah-wilayah lainnya sampai sekarang ini masih berstatus wilayah setingkat kampung. Sebagai gambaran tentang karakteristik penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Distrik Muara Tami, 2013

Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Total
Koya Barat	2.456	2.221	4.677
Holtekamp	532	508	1.040
Skow Yambe	295	307	602
Koya Timur	1.844	1.683	3.527
Skow Mabo	319	282	601
Skow Sae	312	275	587
Koya Tengah	225	161	386
Kampung Mosso	281	168	449

Sumber : Data diolah dari Kota Jayapura Dalam Angka 2014 . Badan Pusat Statistik Kota Jayapura 2014

Sayangnya, data statistik di atas tidak memuat gambaran tentang latar belakang etnis

sebagai salah satu persoalan penting dalam kaitan dengan perkembangan demografi wilayah tersebut. Data statistik yang ada hanya tersegregasi berdasarkan jenis kelamin semata. Bagaimana penduduk OAP beradaptasi, bertahan sekaligus berkompetisi dengan penduduk pendatang hanya dapat ditangkap melalui pengamatan secara langsung. Hal tersebut terwakili melalui perbedaan tampilan fisik dan pola pemukiman yang berkembang di Muara Tami. Pengamatan tim peneliti menunjukkan bahwa perubahan kondisi fisik lingkungan wilayah distrik menunjukkan perubahan yang signifikan. Kemajuan yang dicapai nampak sangat didorong, dipengaruhi oleh kelompok penduduk pendatang. Dengan kata lain bahwa perubahan atau kemajuan distrik Muara Tami berjalan seiring dengan kemajuan yang terjadi pada para transmigran wilayah tersebut.

Saat ini, lokasi hunian penduduk yang paling maju berada di wilayah Koya Barat dan Koya Timur yang menjadi konsentrasi pengembangan transmigrasi. Wilayah tersebut telah berkembang menjadi kawasan pemukiman yang paling besar di distrik itu dan sekaligus menjadi pusat perdagangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar distrik Muara Tami. Perkembangan ekonomi setempat didukung oleh infrastruktur jalan arteri provinsi yang baik, listrik, pasar dan sistem perbankan, menjadikan wilayah Koya Barat dan Koya Timur sebagai pusat orientasi utama bagi rumah-tangga penduduk di distrik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.



Gambar 2. Kawasan Perdagangan di Jalan Utama Koya Barat (Dok. Tim)

Kondisi lahan yang luas dengan kontur yang landai menjadikan wilayah distrik Muara Tami menjadi salah satu wilayah penting pemasok kebutuhan pangan Kotamadya Jayapura. Kehadiran para transmigran sejak dekade akhir 1980an di distrik Muara Tami menjadikan wilayah itu sekarang sebagai tempat produksi pertanian padi sawah dan ladang terpenting di Kota Jayapura. Distrik Muara Tami juga memiliki potensi sebagai produsen tanaman pertanian lainnya seperti Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kedelai dan Kacang Hijau dengan hasil produksi tahunan yang lebih besar di banding wilayah-wilayah distrik lainnya di Kota Jayapura.

Tabel 4. Hasil Produksi Pertanian Kotamadya Jayapura Per Distrik, 2014 (dalam Ton)

Wilayah Distrik	Padi Sawah	Padi Ladang	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Jagung	Kacang Tanah	Kedelai	Kacang Hijau
Abepura	0	0	192	224	53,8	11,7	5,6	3,9

Jayapura Selatan	0	0	256	49	8,1	0	0	0
Jayapura Utara	0	0	88	77	12,1	0	0	0
Muara Tami	4,030	2,080	560	518	21,054	75,4	5,6	5,2
Heram	0	0	200	140	34	0	0	0

Sumber: *Data diolah dari Kota Jayapura Dalam Angka 2014*

Di luar produksi pertanian, distrik Muara Tami juga memiliki potensi besar dalam bidang peternakan dan perikanan (Tabel 3 dan 4). Tabel 3 menunjukkan bahwa populasi hewan ternak --khususnya sapi dan kambing—menjadikan wilayah ini sebagai pemasok ternak terbesar di wilayah Kota Jayapura. Sementara jumlah hewan ternak babi menempati posisi kedua setelah distrik Abepura.

Apabila kita memperhatikan kegiatan produktif dengan nilai ekonomis tinggi di wilayah tersebut, perkembangannya memiliki korelasi langsung dengan struktur demografi masyarakat setempat. Sebagai wilayah transmigran dari pulau Jawa dan Sulawesi, mayoritas penduduk dengan latar belakang agama Islam menjadikan wilayah itu menjadi produsen utama hewan ternak sapi dan kambing yang merupakan konsumsi daging yang mungkin diusahakan kelompok etnis tersebut. Sementara peternakan babi lebih banyak diusahakan penduduk Orang Asli Papua (OAP) dan minoritas penduduk etnis lainnya yang beragama non-Muslim.

Tabel 5. Hasil Produksi Peternakan Kotamadya Jayapura Per Distrik, 2014 (dalam Ton)

	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi
Abepura	431	0	0	341	4,189
Jayapura Selatan	269	0	0	85	897
Jayapura Utara	0	0	0	0	1,047
Muara Tami	4,624	0	0	851	1,782
Heram	53	0	0	426	2,619

Sumber: *Data diolah dari Kota Jayapura Dalam Angka 2014* . Badan Pusat Statistik Kota Jayapura 2014.

Distrik Muara Tami juga menjadi tempat penting dalam produksi kebutuhan konsumsi daging ayam dan perikanan di Kota Jayapura. Khusus dengan sektor perikanan, distrik Muara Tami menjadi wilayah penting pengembangan perikanan ikan tawar yang dipasarkan di pusat-pusat kota Jayapura. Keberadaan kolam-kolam ikan air tawar itu sekaligus menjadikan distrik itu menjadi salah satu tempat tujuan wisata pemancingan ikan yang terkenal di kota Jayapura.

Tabel 5. Produksi Hewan Unggas dan Perikanan di Kota Jayapura (dalam Ton)

Wilayah Distrik	Unggas				Perikanan	
	Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Itik	Ayam Petelur	Laut	Darat
Abepura	6.311	42.736	76	-	99	116
Jayapura Selatan	4.291	-	26	-	378	42
Jayapura Utara	757	28,477	15	-	504	26
Muara Tami	10.100	1.324.207	208	-	67	715
Heram	3.786	28.459	20	-	-	72

Sumber: *Data diolah dari Kota Jayapura Dalam Angka 2014* . Badan Pusat Statistik Kota Jayapura 2014.

Ringkasnya, data-data statistik di atas menjadi petunjuk tentang bagaimana gerak penduduk pendatang menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk wilayah setempat. Gerak dan produktivitas yang terjadi cenderung kontras dengan gerak dan produktivitas penduduk asli Papua. Perbedaan tersebut pada akhirnya menggring pada persepsi tentang ketimpangan, kesenjangan dan dominasi. Dalam praktek ekonomi, para pendatang telah dicirikan dengan kegiatan perekonomian di sektor pertanian, perternakan dan perdagangan yang telah dikelola secara modern dengan jaringan perdagangan yang juga cukup luas. Keberadaan pemukiman para pendatang ini pula yang kemudian menjadi kekuatan yang mengubah wilayah distrik Muara Tami dari sekedar hutan belantara dan semak belukar dalam dua dekade sebelumnya menjadi wilayah hunian dan perdagangan yang sangat dinamis dan menguntungkan.

Profil Pedagang Pendatang di Distrik Muara Tami

Untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana kemajuan ekonomi dari kaum pendatang yang menghuni distrik Muara Tami sejak pertengahan dekade 1980an, bagian ini akan menguraikan beberapa ilustrasi kegiatan perdagangan yang dilakukan para pedagang pedagang yang tinggal di distrik tersebut. Salah satunya adalah Hajjah Lintin Umi Fauziah, pemilik Toko Makrifat yang menjual barang-barang kelontong di distrik Muara Tami. Ia telah tinggal di wilayah itu sejak pertengahan dekade 1990an bersama keluarga yang berasal dari Jawa Tengah.



Gambar 6. Toko Kelontong Ma'rifat di Pasar Koya. Toko ini menyediakan kebutuhan barang-barang konsumsi sehari-hari penduduk di distrik Muara Tami

Menurut Hajjah Lintin, kegiatan usahanya telah berkembang sejak tahun 2002 dan berkembang dengan dukungan kredit dari BPD Papua. Tokonya sendiri menjual barang-barang yang didistribusikan CV Maju Makmur melalui sistem konsinyasi dengan rentang periode pembayaran satu bulan setelah kedatangan barang. Kecuali sayur-mayur, Toko Ma'rifat memiliki kelengkapan yang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari penduduk distrik Muara Tami yang berbelanja di Pasar Koya.

Menurut Hajjah Lintin, harga barang-barang yang dijual di tokonya tidak berbeda jauh dengan harga yang ada di Pulau Jawa. Dalam sistem kerjasama konsinyasi dengan CV Maju Makmur, ia tidak perlu menanggung biaya pengiriman barang karena biaya tersebut sudah menjadi tanggungan agen yang menitipkan barang-barang di tokonya. Tidak seperti beberapa pedagang eceran di Pasar Koya lainnya, Hajjah Lintin menyatakan bahwa ia tidak ikut terlibat dalam perdagangan di perbatasan Skow-Wutung meski perbedaan harga jual di perbatasan menawarkan keuntungan yang lebih besar.

Dalam kaitan ini kita mendapatkan gambaran tentang kisah sukses pedagang pendatang yang mengembangkan usaha kelontong di distrik Muara Tami. Kemajuan usaha toko kelontongnya berjalan seiring dengan akses mendapatkan kredit perbankan dari BPD Papua dan juga kepercayaan agen yang menyalurkan barang-barang di tokonya. Selain toko kelontong, ia pun mengembangkan usaha dengan membuka toko bahan bangunan yang berdampingan dengan toko kelontongnya yang sekaligus menjadi tempat tinggal keluarga.



Gambar 7. Toko Usaha Jaya yang berdampingan dengan Toko Kelontong Ma'rifat yang menjadi tempat tinggal keluarga Hajjah Lintin di distrik Muara Tami

Ringkasnya, terdapat gambaran tentang akses terhadap modal dan jaringan kerjasama

dengan agen yang menjadi kekuatan perkembangan usaha Hajjah Lintin dan keluarga di distrik tersebut. Kisah serupa ditunjukkan pula dalam pengalaman Hajjah Abdullah

Daeng, pemilik Toko Minasa Jaya yang berjualan barang kebutuhan rumah tangga seperti mebel, peralatan elektronik dan pecah-belah. Sebelumnya ia telah mengawali pengalaman berdagang di tempat kelahirannya di Makassar dan sempat mengadu nasib berjualan di perbatasan Timor-Timur - Indonesia pada 1999. Namun, usahanya tidak terlalu menguntungkan dan terpaksa kembali ke Makassar untuk memulai usaha baru.

Pada awal 2002 ia diajak adik lelakinya yang berjualan barang-barang elektronik di pasar perbatasan Skouw-Wutung dan dipinjami modal sebesar Rp. 25.000.000. Ia pun memulai usaha dagangnya dengan berjualan perlengkapan rumah tangga dan pakaian di perbatasan dengan membuka kios kecil sekaligus tempat tinggal keluarganya. Kali ini ia bernasib baik. Usahanya terus berkembang sehingga dapat menyewa tempat yang lebih luas di daerah Koya Barat –sebagai salah satu wilayah yang sangat strategis. Lima tahun kemudian, berhasil mengembangkan usahanya dengan membeli tempat tinggal di Koya Barat, sekaligus berfungsi sebagai toko tempat berdagang. Ia pun menyewa 10 kios di pasar perbatasan yang diperolehnya dari para pemilik kios orang pribumi tempat ia menjual barang-barang dagangannya.



Kisah suksesnya sekali lagi mengulangi kisah terdahulu seperti ditunjukkan dalam kisah Hajjah Lintin. Ia mendapatkan kepercayaan mengambil barang dari para

pedagang Makassar lainnya di pasar Hamadi di pusat kota Jayapura dan mendapatkan akses kredit dari bank Mandiri untuk pengembangan usahanya.

Dari kisah-kisah yang dituangkan dalam ilustrasi di atas, terdapat pola gerak dan produktivitas berbeda antara penduduk pendatang dan penduduk asli orang Papua. Perbedaan tersebut didasarkan pada budaya yang berbeda ditopang dengan jaringan usaha, akses informasi, modal dan mental pedagang yang menjadi bagian dari penentu keberhasilan pedagang pendatang di distrik Muara Tami. Pertanyaan pentingnya adalah sejauhmana penduduk pendatang asli Papua mengimbangi gerak, produktivitas yang dimiliki pedagang pendatang? Uraian dan analisis terhadap gambaran kehidupan orang asli Papua di distrik Muara Tami sepanjang dua dekade terakhir akan dibahas selanjutnya secara khusus dalam bab berikutnya.

Penutup

Tidak dapat disangkal, pengembangan gerai perbatasan dengan dukungan infrastruktur yang menopang aliran distribusi menuju wilayah perbatasan, seperti jembatan, jalan dan pembangunan gerai perdagangan itu sendiri telah memberikan arti positif bagi perdagangan wilayah perbatasan Skouw-Wutung dalam waktu lima tahun terakhir ini. Bahkan kegiatan perdagangan dengan penduduk PNG tidak lagi terbatas pada wilayah perbatasan Skouw-Wutung, tetapi juga sampai ke pusat-pusat kota di Jayapura melalui jalur laut dan darat.

Kegiatan perdagangan perbatasan di wilayah Skow-Wutung telah berkembang sejak tahun 2002 dengan munculnya pasar kaget di tapal perbatasan. Kegiatan perdagangan itu didominasi para pedagang asal etnis Bugis-Makassar yang memiliki keahlian berdagang di wilayah itu yang membawa barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, makanan kemasan, barang elektronik dan bahan bangunan. Sebagai upaya menertibkan kegiatan perdagangan di wilayah tapal batas itu, pada 2004 pemerintah Provinsi Papua bekerjasama dengan Kadin Papua mengembangkan pembangunan sentra perdagangan yang melahirkan pasar Kadin dan pasar Lochin dengan tajuk kegiatan *Christmas Border* yang mengakomodir 106 pedagang yang aktif di pasar kaget di wilayah tapal batas (Tabloidjubi.com, 11/02/2015, akses 10 Oktober 2015).

Perkembangan lebih lanjut perdagangan perbatasan terjadi sejak pertemuan Presiden SBY dan Perdana Menteri PNG pada 2010 yang membawa pula rencana kesepakatan tingkat menteri terkait dengan kegiatan kerjasama perjanjian keamanan (*Defence Cooperation Agreement*), Perjanjian Perpajakan Ganda (*Double Taxation Agreement*) dan Perjanjian Pertukaran Produk Pertanian (*Letters of Exchange on Agriculture*). Dalam pertemuan antara kepala negara dua wilayah itu, disepakati pula langkah membuka secara resmi wilayah perbatasan untuk mengembangkan jalinan hubungan *people to people* di wilayah perbatasan. Presiden SBY sendiri direncanakan akan menandatangani prasasti di pos perbatasan RI-PNG sebagai langkah kongkrit perjanjian kesepakatan yang tertunda selama dua tahun sebelumnya.

Kementrian perdagangan RI sendiri telah melakukan langkah pengembangan pasar percontohan di perbatasan (gerai perbatasan) sebagai langkah kongkrit mewujudkan kerjasama dua negara tersebut. Pada 27 Juni 2011, mantan Menteri Perdagangan Marie Pangestu saat itu menyampaikan di hadapan wartawan bahwa pemerintah mencanangkan agenda pembenahan perdagangan di wilayah perbatasan. Pada saat itu, pemerintah memfokuskan terlebih dahulu pada pengembangan kawasan perbatasan Skow-Wutu sebagai prioritas awal agenda pembenahan perdagangan perbatasan. Berdasarkan langkah itu, pemerintah berharap mendapatkan model percontohan yang kemudian dapat diterapkan dalam pengembangan gerai perdagangan di sembilan (9) kawasan perbatasan lainnya, termasuk Entikong di Kalimantan Barat (*Tempo Interaktif*, 27 Juni 2011).

Ada beberapa alasan mengapa kawasan Skouw-Wutung menempati prioritas awal pengembangan gerai perdagangan di wilayah perbatasan dari kementrian perdagangan saat itu. Pertama, lokasinya yang strategis telah menjadikannya sebagai pintu masuk penting pengembangan ekspor Indonesia ke wilayah PNG. Kedua,

kegiatan perdagangan di wilayah itu—yang berlangsung di pasar tradisional Lo-Chin

dan Marketing Point (yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Papua) telah memberikan pemasukan besar bagi Indonesia dengan nilai transaksi yang mencapai US \$ 202,430.- pada 2010 (Kementrian Perdagangan RI, 25 Juni 2011).

Satu gambaran menarik dari perkembangan gerai perbatasan ini adalah upaya pemerintah untuk mendorong keterlibatan Orang Asli Papua dalam kegiatan ekonomi di wilayah ini. Langkah kebijakan yang diambil dalam upaya ini adalah penetapan kebijakan diskriminasi positif dengan membagi jumlah los pasar bagi para pedagang antara para pendatang dan OAP masing-masing 50% dari jumlah total 200 los.

Selain distribusi kios yang mencoba melibatkan OAP dalam kegiatan perdagangan, pemerintah melalui kementerian perdagangan juga menggulirkan agenda pemberdayaan yang memberikan pengetahuan teknis kepada Orang Asli Papua tentang seluk-beluk perdagangan, mulai dari penentuan harga barang, kualitas dan sistem distribusi sampai dengan manajemen pemasarannya. Namun, hasil pengamatan dan kajian lapangan mendapatkan bahwa setelah pasar itu beroperasi lebih dari dua tahun berselang, tim peneliti tidak lagi menemukan orang-orang asli Papua yang turut berdagang di wilayah tersebut. Saat kajian ini dilakukan, hampir para pedagang non-Papua yang justru menguasai seluruh kios perdagangan di pasar percontohan tersebut. Pengalihan pemilikan kios-kios berdagang melalui sistem sewa dan penjualan sekarang ini telah menyebabkan orang-orang asli Papua tidak lagi menjadi bagian penting dari perkembangan pasar perbatasan tersebut sehingga Orang Asli Papua tidak menjadi bagian daripenerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi wilayah setempat.

Kalau pun ada beberapa pedagang Papua yang turut berdagang di pasar itu, mereka sekarang hanya berjualan di lapak-lapak kecil di sekitar pasar. Realitas saat ini kembali pada kondisi sebelum ada intervensi kebijakan ekonomi dan wilayah di Papua. Sebagian besar penduduk lokal “terpingirkan” dan tinggal di sekitar distrik Muara Tami, seperti Kampung Moso dan penduduk di daerah Skouw Mabo. Lapak-lapak berjualan mereka dibuat secara sederhana dan berada dibagian depan dalam lokasi pasar tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk halaman parkir.

Di samping perbedaan kultur antara orang asli Papua dan orang pandangan yang sebagian besar berasal dari Bugis, Makasar dan Jawa. Penduduk Papua asli memiliki kultur peramu sementara pendatang memiliki latar belakang kultur pedagang. Perbedaan kultur tersebut juga menjadikan basis pengetahuan, keterampilan, jaringan dan mental bersaing yang sangat berbeda. Persoalan ini membawa tim peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang keberadaan orang-orang asli Papua di wilayah Muara Tami dan aktivitas perekonomiannya mereka dengan tujuan memahami mengapa terjadi ketertinggalan atau kecenderungan marjinalisasi pedagang orang asli Papua khususnya perempuan pedagang Papua di wilayah tersebut.